

PEMULYAAN PENDIDIKAN PEREMPUAN MENUJU MASYARAKAT MODERN: DI RUMAH SAKINAH SURABAYA

Nur Wahib

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid, Surabaya, Indonesia
nurul_iman42@yahoo.com

Abstract

The problems that befell women occur due to the imbalance of relations between men and women. Until now it is still a terrible specter. The hope for empowered women is certainly thought by many parties. Here, additional insight needs to be done so that women are empowered. So that they have a good bargaining position in various aspects of social, cultural, political and economic life that have made women trapped in stereotypes, subordination, marginalization, double burdens and violence and will be far from exploitation that has often occurred. Rumah Sakinah cannot be separated from seeing the various problems faced by the women of her nation. The large number of female members (cadres) is a big asset for Rumah Sakinah in moving and taking part from the top to the bottom level through several coordinations to deal with the context (change) of its era. Modern society is a social structure or public life environment where human relations are regulated on the basis of business, production, consumption and commercialization. In modern society, attention is more focused on the attitudes and values of individuals and the productivity capabilities of human resources. Therefore, the backwardness of the community (perceived) stems from internal factors of the State or the community itself, especially in the field of education.

Keywords: Breeding, Women's Education. Modern Society.

Abstrak

Permasalahan yang menimpa kaum perempuan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang masih menjadi momok yang mengerikan. Harapan agar perempuan berdaya tentu dipikirkan banyak pihak. Disini, penambahan wawasan perlu dilakukan agar para perempuan berdaya. Sehingga mereka memiliki posisi tawar (bargaining position) yang bagus dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang telah membuat perempuan terjebak dalam stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan dan akan jauh dari eksploitasi yang selama ini sering terjadi. Rumah Sakinah tidak bisa lepas tangan melihat berbagai problem yang dihadapi perempuan bangsanya. Banyaknya anggota (kader) perempuan, merupakan modal besar bagi Rumah Sakinah dalam bergerak dan berkiprah dari atas ke tingkatan bawah melalui beberapa koordinasi menghadapi konteks (perubahan) zamannya. Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan kehidupan publik

tempat relasi antar manusia diatur atas dasar business, produksi, konsumsi dan komersialisasi. Pada masyarakat modern, perhatian lebih ditekankan pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan produktifitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keterbelakangan masyarakat (dianggap) bersumber pada faktor-faktor intern Negara atau masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Pemulyaan, Pendidikan Perempuan. Masyarakat Modern.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia (laki-laki maupun perempuan) dari zat yang sama, namun keduanya mempunyai *stereotype* yang berbeda, baik dari sudut pandang fisik, psikologis, dan sosial, perempuan berbeda dengan laki-laki. Namun, perbedaan ini bukan berarti mereka (perempuan) harus termarginalkan dan dieksploitasi dalam mengembangkan pribadinya. Mereka juga punya hak dalam memperjuangkan eksistensinya dan juga membangun realita hidupnya.¹

Dalam hal kemanusiaan, Islam memandang perempuan sama persis dengan laki-laki, ia juga ahli beragama dan beribadah.² Mereka akan sama-sama masuk surga jika berbuat baik dan mendapat siksa jika berbuat jahat.

Perempuan memang merupakan makhluk yang mempunyai ciri yang khas tersendiri, lemah lembut, penuh kasih sayang, keindahan, memelihara, juga perasaannya yang halus. Namun sayang, dari perbedaan inilah yang menyebabkan kaum perempuan sering tidak mendapatkan ketidakadilan di berbagai bidang dan bahkan perlakuan kejam. Ketidakadilan dalam mendapatkan akses dan pemanfaatan ekonomi, sosial, politik serta yang lain, masih menjadi problem yang dihadapi masyarakat perempuan.

Munculnya berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan seperti perdagangan (anak) perempuan (*trafficking*), diskriminasi upah buruh perempuan, penipuan dengan modus pengiriman TKW, eksploitasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk *marital rape*, kekerasan seksual, aborsi, infeksi menular seksual (IMS) hingga dampak nyata yang harus dihadapi perempuan karena kemiskinannya.³

Harus diakui, bahwa permasalahan yang menimpa kaum perempuan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. dan sampai sekarang

¹ Murtadla Muthahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995), hal. 107

² Musthofa As-Shiba'i, *Wanita Dalam Pergumulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, (Jakarta: Intimedia, tt), hal. 29

³ Julia Cleves Mosse, *An Introduction to Gender and Development* "terj". Hartian Silawati, *Gender Dan Pembangunan*, Cet. IV (. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hal. 209

masih menjadi momok yang mengerikan. Permasalahan ini harus dipikirkan oleh semua pihak dengan segala kapasitasnya sebagai problem sosial, bukan sekedar masalah seksual pelengkap atau sesuatu yang menyenangkan – seperti yang banyak dipikirkan oleh kaum lelaki.⁴

Fenomena di atas menggugah banyak kalangan untuk ikut terlibat secara aktif guna memberdayakan perempuan. Berbagai upaya pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan, diharapkan mampu menciptakan bingkai relasi sosial yang dapat mewujudkan relasi yang bersetara dan berkeadilan. Sehingga perempuan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang bagus dalam berbagai aspek kehidupan social, budaya, politik dan ekonomi yang telah membuat perempuan terjebak dalam stereotipe, subordinasi, marjinalisasi, beban ganda dan kekerasan dan akan jauh dari eksploitasi yang selama ini sering terjadi.

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Tujuannya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemandirian, dengan bekal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dapat terwujud kepekaan dan kepedulian perempuan dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum serta pendukung kemajuan dan kemandirian perempuan.

Permasalahan di atas mendapat perhatian dari beberapa kalangan. Misalnya *Rumah Sakinah*. Sebagai sebuah organisasi kader perempuan yang merupakan organisasi dalam lingkup masyarakat yang erat kaitannya dan paling berpeluang dalam menyentuh kehidupan perempuan sampai tingkat *grass-root*. *Rumah Sakinah* tidak bisa lepas tangan melihat berbagai problem yang dihadapi perempuan bangsanya. Banyaknya anggota (kader) perempuan, merupakan modal besar bagi *Rumah Sakinah* dalam bergerak dan berkiprah dari atas ke tingkatan bawah melalui beberapa koordinasi menghadapi konteks (perubahan) zamannya.

⁴ Fadmi Sutiwi, *Perempuan dan Gerakan Pemberdayaan Sebuah Dinamika*, Dalam Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan. Edisi Khusus Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 3-8 Juli 2005 hal. 58.

Konsep Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan keadilan. Begitu juga dengan Islam. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan tersebut.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah :8)

Al-Qur'an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan teologis (agama), ekonomi, politik, budaya, kultural termasuk keadilan gender.⁵ Secara *diskrit*, di dunia ini yang diakui sebagai manusia "lumrah" adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun menyandang predikat sebagai manusia "lumrah", akan tetapi terdapat ketimpangan di antara keduanya, represi (penindasan) yang sungguh luar biasa. Laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, ini adalah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.⁶

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Adapun pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁷ Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan⁸ perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata

⁵ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. IX* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 135

⁶ Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam Cet. I.* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 5

⁷ Herman Saksono, *Pusat Studi wanita* (<http://www.yoho.com>, diakses 24 November 2005)

⁸ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka esantren, 2004), hal 1.

Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampainya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.⁹ Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.¹⁰ Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.¹¹

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan.¹² Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural.¹³

⁹ *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 448

¹⁰ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hal. 501

¹¹ *Ibid.*, hal. 108-110

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa* Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 4

¹³ Mansour Fakih, *loc. cit* hal. 9

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.¹⁵

Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturenya, dan karena itu memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan.¹⁶

2. Pengertian Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk Tuhan nomor dua, separoh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki, dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

¹⁴ Dwi Ambarsari, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan Cet. I* (Surakarta: Pattiyo, 2002), hal. 3

¹⁵ Trisakti Handayanirakat, *Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan*, dalam Suara Wanita, Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan. Universitas Muhammadiyah Malang. 1996. hal. 9

¹⁶ Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 11

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pemberdayaan pendidikan perempuan. Konsep pemberdayaan pendidikan ini sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap perempuan. Sehingga perempuan dalam menggapai realitas hidup tidak dipandang sebagai makhluk yang serba kekurangan.¹⁷

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.¹⁸ Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan pendidikan perempuan menekankan pada aspek ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan, khususnya kelompok lemah agar memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Adapun pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan adalah suatu cara atau upaya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan perempuan.
- b. Melakukan kampanye dan memberikan penyadaran kepada kaum perempuan akan pentingnya pendidikan dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 314

¹⁸ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2003), hal. 35

untuk mendapatkan pendidikan. Untuk meminimalisir pelecehan-pelehan atau ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, maka sangat dimungkinkan sosialisasi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi suatu keniscayaan.

- c. Melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan bagi perempuan. Kegiatan ini sangat urgen, karena ini akan menjadi landasan dasar bagi siapa saja yang mengkampanyekan gerakan gender. Fakta ini menjadi tolok ukur untuk menentukan orientasi pergerakan gender. Kalau di suatu tempat, tingkat pendidikan perempuan sangat minim, maka berbagai kegiatan dapat disusun guna menutupi kekurangan itu.
- d. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap segala kendala dan hambatan yang akan dihadapi dalam proses pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena tidak sedikit fakta dilapangan yang ditemui, berbeda dengan harapan. Sehingga kalau sudah ada persiapan yang matang tentang antisipasi kendala yang akan ditemui, dapat dikatakan aktivitas apapun akan berjalan dengan lancar.¹⁹

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

Pembangunan pemberdayaan pendidikan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya pemberdayaan perempuan menuju kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan pendidikan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya.²⁰ Adapun indikator-indikator pemberdayaan pendidikan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya wahana dan sarana yang memadai serta aturan perundang-undangan yang mendukung terhadap perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Edi Suharto. *Loc. Cit.* hlm. 57

- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- c. Meningkatnya jumlah prosentase perempuan dalam lembaga-lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi.
- d. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang *egaliter*. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Kalau ini telah terealisasi, maka pendidikan perempuan benar-benar telah terberdayakan.

4. Peran Pendidikan dalam Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup perempuan, dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau advokasi pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang kehidupan.

Dalam agama Islam sendiri diajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya sama dalam hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam Islam dianjurkan menegakkan persamaan di bidang hukum dan pendidikan. Antara laki-laki dan perempuan harus mendapatkan hak atas pendidikan tanpa harus mengalami diskriminasi. Melalui pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan, baik ilmu keagamaan maupun kemasyarakatan, manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai *khalifah fil-ardl*.²¹

Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan penuh kepribadian, kompetensi, *skill*, ketrampilan serta pengokohan rasa hormat terhadap Hak Asasi Manusia dan

²¹ Miftahul Huda, *Hak Asasi Manusia dan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyah el-Hikmah, Edisi Mei-Juni. 2004. hal. 127

prinsip-prinsip kebebasan. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk bebas berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya. Selain itu, pendidikan juga sangat berarti terutama bagi pemberdayaan perempuan. Melalui pendidikan, perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mempunyai kemampuan dan keamanan, guna kemandirian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal pendidikan, ada tiga jenis pendidikan yang wajib ditempuh oleh perempuan:

- a. Pendidikan yang wajib bagi setiap orang demi menjaga kehidupannya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya.
- b. Pendidikan yang bermanfaat bagi keluarganya.
- c. Pendidikan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekelilingnya.

Meskipun gerakan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan mulai diberdayakan. tetapi masih ada hambatan-hambatan yang berupa asumsi negatif tentang tabi'at perempuan. Salah satu diantaranya adalah, asumsi yang berasal dari teks-teks keagamaan yang ditafsirkan secara tekstual dan konservatif, tanpa memandang kultur sosiologis yang berkembang. Seperti, bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah akal dan agamanya lemah. Padahal asumsi ini terpengaruh oleh kondisi sosial perempuan Arab pada waktu itu.

Perlu diketahui, bahwa harapan-harapan tersebut di atas, akan sulit terakbul, kecuali melalui uluran-uluran tangan dan nurani ibu-ibu pendidik, serta pemerhati nasib perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki bekal yang memadai. Belum pernah terpikirkan oleh kita, bagaimana kita akan membentuk dan membina generasi yang unggul dan tangguh, jika kaum ibu saja masih terbelakang tanpa pendidikan.

Perempuan Dan Masyarakat Modern

1. Pengertian Masyarakat Modern

Modernisasi merupakan satu kata baru untuk suatu fenomena lama, yang berlapis-lapis, kesemuanya mencakup proses perubahan sosial bersifat *revolusioner*,

kompleks, sistematis, global, bertahap, hegemonisasi dan progresif seperti Indonesia. Teori Modernisasi ini lahir pada tahun 1950-an dan merupakan tanggapan kaum intelektual terhadap Perang Dunia. Bagi para penganut teori evolusi, modernisasi dianggap sebagai jalan optimistis menuju perubahan.

Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan kehidupan publik tempat relasi antar manusia diatur atas dasar business, produksi, konsumsi dan komersialisasi.²² Pada masyarakat modern, perhatian lebih ditekankan pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan produktifitas sumber daya manusia.

Masyarakat modern merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang, baik budaya, politik, ekonomi dan sosial, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Masyarakat modern juga merupakan suatu tatanan sosial yang lebih mengedepankan rasionalitas, universalisme, equalitarianisme, spesialisasi fungsional, dan tidak ketinggalan juga tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.²³

Sistem stratifikasi pada masyarakat modern cenderung menjadi terbuka dan fleksibel, kesempatan atau lapangan kerja modern, pola-pola hubungan sosial didasarkan pada skill. Kemajuan teknologi, pertumbuhan industri pabrik dan jasa, revolusi ilmu dan inovasi organisasi sangat mendorong ke arah spesialisasi fungsi-fungsi, pembentukan birokrasi rasional yang ditangani oleh person (orang) yang menguasai teknik managerial dan professional.

Sementara pendidikan pada masyarakat modern merupakan symbol kemajuan dan kebanggaan nasional. Meskipun pendidikan menjadi symbol kemajuan dalam masyarakat modern, tetapi pengembangan pendidikan yang berat sebelah akan menghasilkan produksi yang cepat, suatu teknik baru. Sedangkan para elit administrasi dalam mengisi kompetisi yang sangat kompetitif tidak tergantung pada status formal (ijazah).²⁴

Dalam bidang politik, bentuk pemerintahan dalam masyarakat modern berperan secara berlebihan dalam ruang lingkupnya yang menyentuh pada setiap segi kegiatan

²² Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat Cst. I* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 215

²³ Francis Abraham. *Perspectives on Modernization: Toward General Theory of Third World Development* "terj". Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 199), hal. 4

²⁴ *Ibid.*, hal. 211

sosio-ekonomi dan bahkan pada aspek kehidupan pribadi. Sistem politik baru melalui badan perundang-undangan, pemerintahan dan pelayanan mendominasi kehidupan ekonomi. Selain itu perubahan yang timbul dalam masyarakat modern yaitu perluasan yang mengacu kepada gejala pembaharuan fisik didalam masyarakat melalui usaha yang dilakukan secara terus menerus.

Dalain bidang budaya, masyarakat modern melakukan perubahan-perubahan dalam struktur normatif masyarakat, khususnya seperangkat nilai yang menghambat tingkat kemajuan peradaban. Suatu perubahan pada nilai-nilai merupakan suatu akibat yang tidak menghambat pada perkembangan ekonomi menurut kaum modernis dianggap sebagai konsekuensi logis dari modernisasi, dan perubahan ini akan menyelamatkan dan membahagiakan rakyat menuju suatu kemakmuran.²⁵

Sementara fungsi Negara bangsa modern tidak lagi dibatasi dengan ketahanan dan pemeliharaan undang-undang dan tatanan, melainkan pembangunan yang telah menjadi tujuan utama. Selain itu, perilaku yang dulunya (tradisional) didasarkan pada pengalaman yang bertumpuk yang disebabkan oleh tradisi, berubah dan dibatasi oleh pengetahuan ilmiah yang didorong oleh percobaan. Keterbukaan pada pengalaman baru, keinginan menerima resiko, aspirasi pendidikan yang tinggi, empati lebih besar dan individualisme merupakan kepribadian masyarakat modern.

2. Perempuan dan Masyarakat Modern

Perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*) menjadi diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan. Agenda yang harus diutamakan dalam program WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, demokratisasi (Cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan bagi perempuan dalam menentukan dan mengelola hidupnya sendiri yang bertumpu pada asas persamaan dan keadilan) terutama bagi perempuan juga sebagai aspek penunjang pemberdayaan perempuan sebagai pelaku pembangunan.

Pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah kemampuan atau kompetensi menjadi prasyarat bagi perempuan agar bisa aktif dalam pembangunan di tengah

²⁵ Eisenstadt, *loc. cit.* hal. 196

modernisasi. Ada tiga kebijakan khusus (*affirmative action*) sebagai langkah dalam mempersiapkan perempuan memasuki era modernisasi,²⁶ yaitu:

- a. Pemberian keahlian dan pembekalan ketrampilan/ kompetensi tertentu (*expert-power*).
- b. Pemberian peluang dan peran (*role power*)
- c. Pemberian fasilitas untuk mewujudkan kemampuan (*resource power*).

Perempuan pada abad ini telah tersebar secara merata dalam berbagai bidang. Kegiatan kemasyarakatan, bahkan tidak jarang pula kita membaca kisahkisah perempuan yang telah berhasil dan sukses dalam kehidupan rumah tangganya serta aktifitas kemasyarakatan yang diikutinya. Tokoh-tokoh yang telah eksis dan sampai berhasil menjadi pimpinan Negara (Presiden RI Ke-5) seperti Ibu Megawati Soekamo Putri, Ibu Tuti Alawiyah (Mantan Menteri Pertanian), Zakiyah Darajat (Psikolog Perempuan), Moeryati Soedibyo, Martha Tilaar (pengusaha perempuan sukses), Pratiwi Soedharmono (Astronot perempuan), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Mirna Budhiarjo (Politikus Indonesia). Di luar negeri, ada Benazir Butho (Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan), All Brigt Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan lain-lain.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah standar hidup, pendapatan perkapita.²⁷ Pembangunan identik dihasilkan dari poliferasi dan integrasi perananperanan fungsi di dalam suatu komunitas. Begitu juga kaitannya dengan perempuan, apabila kaum perempuan di era modern masih menafsirkan dirinya dan berbekal sifat kodratnya, dan tidak peka oleh perubahan zaman, maka perempuan akan meneruskan sejarah ketertindasannya, marginalisasi, subordinasi, korban kekerasan, serta memikul label makhluk nomor dua setelah laki-laki. Hal itu semua hanya dan bisa di minimalisir serta di hilangkan melaui penyiapan perempuan yang kualitatif, kompeten serta moderat.

Salah satu faktor penyebab keterpurukan kaum perempuan yaitu, adanya suatu kebijakan pemerintah, yang merupakan produk politik yang tidak memihak pada

²⁶ Fadmi Sutiwi. *Loc. Cithal*. 58

²⁷ Francis Abraham, *loc. Cit.* hal. 6

kaum perempuan, dan identik dengan kekuasaan.²⁸ Bahkan kebijakan tersebut mengandung berbagai kepentingan termasuk budaya patriarki.

Perempuan di era modern merupakan *stakeholders* pembangunan, karena itu pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan. Keterlibatan masyarakat perempuan untuk ikut memberikan masukan dalam perumusan serta pengawasan. Sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tanpa suatu penindasan dalam bentuk apapun.

Marnisi Seorang Sosiolog perempuan asal Maroko pernah melakukan penyerangan terhadap pendapat dari golongan konservatif lama tentang pemisahan perempuan dengan menyatakan hanya merupakan institusionalisasi otoritarianisme, yang dikembangkan dengan cara manipulasi teks-teks suci.²⁹ Pendekatan yang dilakukan oleh adalah mencoba melakukan reinterpretasi atas teks-teks al-Quran dengan berbasis pada kontekstualisasi ayat-ayat suci tersebut.

Peranan Rumah Sakinah Daerah Malang dalam Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

Sebagai suatu organisasi yang lahir dari semangat dua perempuan, benar-benar ingin menempatkan dirinya pada posisi yang proporsional. Sebagai organisasi perempuan, *Rumah Sakinah* benar-benar telah menjadi *Agent of change* dengan banyak terlibat secara aktif dalam beberapa agenda baik regional maupun nasional.

1. Sebagai Pelopor/ Suri Tauladan³⁰

Sebagai sebuah organisasi perempuan yang berkiprah dalam pembangunan dan pemberdayaan umat menuju masyarakat modern, *Rumah Sakinah* dalam program-program kerja organisasi selalu berusaha untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut Pemberdayaan Pendidikan Perempuan.

²⁸ Dwi Ambarsari, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan Cet. I.* (Surakarta: Patti, 2002), hal. 10

²⁹ *Ibid.*, hlm 343

Pengetahuan keagamaan (keimanan/tauhid) merupakan suatu bekal yang harus dimiliki oleh setiap kader perempuan *Rumah Sakinah*, mengingat godaan yang begitu deras terutama yang disebabkan oleh arus modernisasi. Modal keimanan ini juga menjadi pegangan bagi *akhwat* sebagai landasan pergerakan, agar jangan sampai pergerakan yang mereka lakukan *kebablasan* seperti kebanyakan pergerakan gender yang ada sekarang ini. Selain itu, keimanan yang dijadikan sandaran pergerakan sekaligus dijadikan identitas pergerakan.

2. Sebagai Kekuatan Kontrol dalam Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

Dalam era modern seperti sekarang ini, dengan semakin majunya akses informasi dan teknologi yang mengakibatkan semakin menguatnya globalisasi, mengakibatkan semakin cepatnya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lain sebagainya. Hal ini secara tidak langsung juga telah mempengaruhi perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap realitas kehidupan yang ada, dimana kadang kala perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat ini tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan yang ada (tidak selalu bersifat positif).

Selain itu guna memberikan kekuatan mental bagi masyarakat termasuk kaum perempuan, *Rumah Sakinah* juga terus melakukan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat untuk bisa memahami dan mengerti segala bentuk perubahan yang ada, sehingga tidak terbawa arus perubahan. Inilah sesungguhnya maksud dari mahasiswa sebagai *agent of change*.

Kesimpulan

Paradigma yang dikembangkan oleh *Rumah Sakinah* adalah paradigma keadilan perempuan. Pola ini kemudian berkonsekuensi pada kebebasan bagi perempuan untuk mengeksplorasi semua potensi yang ada pada diri mereka dengan tetap mempertahankan kodrat keperempuanannya. Pendidikan yang bermutu merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh perempuan dalam rangka pemulyaan diri perempuan.

Daftar Pustaka

- Dwi Ambarsari, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*, Cet. I, Surakarta: Pattiro, 2002.
- Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan, 2003.
- Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Cet. I, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Fadmi Sutiwi, *Perempuan dan Gerakan Pemberdayaan Sebuah Dinamika*, Dalam Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan. Edisi Khusus Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 3-8 Juli 2005.
- Francis Abraham. *Perspectives on Modernization: Toward General Theory of Third World Development* "terj". Rusli Karim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Julia Cleves Mosse, *An Introduction to Gender and Development* "terj". Hartian Silawati, *Gender Dan Pembangunan*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Miftahul Huda, *Hak Asasi Manusia dan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyah el-Hikmah, Edisi Mei-Juni. 2004.
- Murtadla Muthahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995.
- Musthofa As-Shiba'i, *Wanita Dalam Pergumulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, Jakarta: Intimedia, tt.

Pemberdayaan Perempuan, <http://www.google.com>, diakses 27 Januari 2006.

Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Trisakti Handayanirakat, *Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan*, dalam Suara Wanita, Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan. Universitas Muhammadiyah Malang. 1996.

Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.